

Survei: Perempuan Lebih Toleran

Kesadaran akan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan.

Maya Ayu Puspitasari

maya.puspitasari@tempo.co.id

JAKARTA — Hasil riset Wahid Foundation menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak mendukung hak kebebasan menjalankan ajaran agama dibanding laki-laki. Sebanyak 80,8 persen perempuan tidak bersedia menjadi radikal dan sebanyak 80,7 persen perempuan Indonesia mendukung hak kebebasan dalam menjalankan ajaran agama dan keyakinan. “Perempuan lebih memberi ruang,” kata Direktur Wahid Foundation, Zannuba Ariefah Chafsoh Rahman atau Yenny Wahid, di Jakarta, kemarin.

Wahid Foundation melakukan survei tren toleransi sosial keagamaan

di kalangan perempuan muslim bersama dengan United Nation Women dan Lembaga Survei Indonesia. Survei yang dilaksanakan pada 6-27 Oktober 2017 di 34 provinsi ini melibatkan 1.500 responden laki-laki dan perempuan dengan metode *multistage random sampling*. *Margin of error* penelitian ini sebesar 2,6 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei ini juga mencatat angka perempuan yang intoleran lebih sedikit ketimbang laki-laki, yakni 55 persen untuk perempuan yang intoleran dan 59,2 persen untuk laki-laki. Selain itu, perempuan memiliki lebih sedikit kelompok yang tidak disukai dibanding laki-laki. “Makin banyak yang tidak disukai,



Pengunjuk rasa perempuan memperingati Hari Lahir Pancasila di Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu, akhir Mei 2017.

makin menunjukkan intoleransi tinggi,” ujar Yenny.

Menurut Yenny, hasil survei itu sekaligus memaparkan situasi toleransi sosial keagamaan di kalangan perempuan muslim. Survei ini menunjukkan peran perempuan muslim dalam membangun toleransi dan perdamaian yang cukup besar. Sayangnya, lebih tingginya sikap toleransi pada perempuan itu tidak diimbangi dengan sikap otonom dalam mengambil keputusan. Hasil survei memperlihatkan hanya 53,3 persen perempuan

yang mengambil keputusan hidup atas pertimbangan diri sendiri. Angka itu jauh di bawah sikap laki-laki yang 80,2 persen menyatakan mampu mengambil keputusan sendiri.

Direktur Riset Lembaga Survei Indonesia Hendro Prasetyo menilai rendahnya otonomi perempuan untuk membuat keputusan itu menyebabkan mereka lebih rentan diajak tergabung dalam gerakan radikalisme. “Dalam hal jihad, probabilitas penga-

ruh suami lebih tinggi karena ada ketergantungan. Padahal (perempuan) tidak bersedia radikal,” katanya. Karena itu, penguatan atas isu gender dan pemberdayaan perempuan dianggap bisa berkontribusi dalam pencegahan gerakan radikal.

Perwakilan United Nation Women Representative, Sabine Machl, menyarankan agar survei berikutnya bisa menggali faktor apa saja yang membuat perempuan menjadi

radikal. “Ini sangat penting,” kata Sabine.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise mengatakan bakal menjadikan hasil survei tersebut sebagai referensi untuk membuat kebijakan terkait dengan pemberdayaan perempuan. “Kami juga akan mempersiapkan perempuan-perempuan untuk menduduki posisi strategis, seperti di parlemen dan kepala daerah,” katanya. ● ARKHELAUS WISNU